



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

**AUDITED**

Jalan Pramuka Nomor 9 Padang  
Sumatera Barat

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu entitas di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, Desember 2022  
Sekretaris,

Firman, SH.M.Si

**DAFTAR ISI**

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar                                        | i   |
| Daftar Isi                                            | ii  |
| Pernyataan Tanggung Jawab                             | iii |
| Ringkasan                                             | 1   |
| I. Laporan Realisasi Anggaran                         | 3   |
| II. Neraca                                            | 4   |
| III. Laporan Operasional                              | 5   |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas                         | 6   |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan                      | 7   |
| A. Penjelasan Umum                                    | 7   |
| B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran | 21  |
| C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca                     | 29  |
| D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional        | 44  |
| E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas  | 50  |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya                       | 54  |
| VI. Lampiran dan Daftar                               | 59  |

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**  
***JALAN PRAMUKA RAYA NO.9 BELANTI PADANG***  
***TELEPON 0751 443017***

---

**PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang,      Desember 2022  
Sekretaris,

Firman, SH.M.Si  
NIP 196505041990031008

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp215.674.800 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp20.478.273.372 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp20.689.313.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.188.188.487 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.165.187.819; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp23.000.668 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp159.614.658 dan Rp4.028.573.829.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0, sedangkan

jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp20.595.440.283 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp20.595.440.283. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp186.094.444 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp20.409.345.839.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp4.175.564.947 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp20.409.345.839 ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp20.262.598.572 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp4.028.573.829.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                        | CATATAN     | TAHUN 2022            |                       | % thd Angg   | TAHUN 2021            |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|                               |             | ANGGARAN              | REALISASI             |              | REALISASI             |
| <b>PENDAPATAN</b>             |             |                       |                       |              |                       |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1         | -                     | 215.674.800           | 0,00         | 215.674.800           |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>      |             | -                     | <b>215.674.800</b>    | <b>0,00</b>  | <b>215.674.800</b>    |
| <b>BELANJA</b>                | <b>B.2.</b> |                       |                       |              |                       |
| Belanja Pegawai               | B.3         | 5.707.987.000         | 5.690.252.880         | 99,69        | 4.858.856.133         |
| Belanja Barang                | B.4         | 14.511.838.000        | 14.319.739.092        | 98,68        | 13.506.174.628        |
| Belanja Modal                 | B.5         | 469.488.000           | 468.281.400           | 0,00         | -                     |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>         |             | <b>20.689.313.000</b> | <b>20.478.273.372</b> | <b>98,98</b> | <b>18.365.030.761</b> |

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## II. NERACA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                                              | CATATAN    | 30 Juni 2022    | 31 Desember 2021 |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| <b>ASET</b>                                         |            |                 |                  |
| <b>ASET LANCAR</b>                                  | <b>C.1</b> |                 |                  |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                        | C.1.1      | -               | -                |
| Kas di Bendahara Penerimaan                         | C.1.2      | -               | -                |
| Kas Lainnya dan Setara Kas                          | C.1.3      | -               | -                |
| Piutang Bukan Pajak                                 | C.1.4      | -               | -                |
| Bagian Lancar TP/TGR                                | C.1.5      | -               | 24.385.000       |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran            | C.1.6      | -               | -                |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek | C.1.7      | -               | (121.925)        |
| Beban Dibayar di Muka                               | C.1.8      | -               | -                |
| Pendapatan yang Masih harus Diterima                | C.1.9      | -               | -                |
| Persediaan                                          | C.1.10     | -               | -                |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                           |            | -               | 24.263.075       |
| <b>ASET TETAP</b>                                   | <b>C.2</b> |                 |                  |
| Tanah                                               | C.2.1      | 2.426.907.000   | 2.426.907.000    |
| Peralatan dan Mesin                                 | C.2.2      | 3.449.844.540   | 3.576.466.120    |
| Gedung dan Bangunan                                 | C.2.3      | 892.347.000     | 892.347.000      |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan                        | C.2.4      | -               | -                |
| Aset Tetap Lainnya                                  | C.2.5      | -               | -                |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                         | C.2.6      | -               | -                |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                     | C.2.7      | (2.603.910.721) | (2.749.745.486)  |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                            |            | 4.165.187.819   | 4.145.974.634    |
| <b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>                       | <b>C.3</b> |                 |                  |
| Piutang Tagihan TP/TGR                              | C.3.1      | 23.116.250      | 24.385.000       |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR    | C.3.2      | (115.582)       | (121.925)        |
| Tagihan TP/TGR (Netto)                              |            | 23.000.668      | 24.263.075       |
| <b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>                |            | 23.000.668      | 24.263.075       |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                 | <b>C.4</b> |                 |                  |
| Aset Tidak Berwujud                                 | C.4.1      | -               | -                |
| Aset Lain-Lain                                      | C.4.2      | 879.902.980     | 593.759.420      |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya    | C.4.3      | (879.902.980)   | (589.516.614)    |
| Jumlah Aset Lainnya                                 |            | -               | 4.242.806        |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                  |            | 4.188.188.487   | 4.198.743.590    |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                    |            |                 |                  |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                      | <b>C.5</b> |                 |                  |
| Uang Muka dari KPPN                                 | C.5.1      | -               | -                |
| Utang kepada Pihak Ketiga                           | C.5.2      | 159.614.658     | 23.178.643       |
| Pendapatan Diterima di Muka                         | C.5.3      | -               | -                |
| Utang Jangka Pendek Lainnya                         | C.5.4      | -               | -                |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek                      |            | 159.614.658     | 23.178.643       |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                             |            | 159.614.658     | 23.178.643       |
| <b>EKUITAS</b>                                      |            |                 |                  |
| Ekuitas                                             | C.7        | 4.028.573.829   | 4.175.564.947    |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                               |            | 4.028.573.829   | 4.175.564.947    |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                 |            | 4.188.188.487   | 4.198.743.590    |

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021**  
*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN                                                | CATATAN | 2022                    | 2021                    |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                           |         |                         |                         |
| <b>PENDAPATAN</b>                                     |         |                         |                         |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak                         | D.1     | -                       | -                       |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                              |         | -                       | -                       |
| <b>BEBAN</b>                                          |         |                         |                         |
| Beban Pegawai                                         | D.2     | 5.827.619.737           | 4.880.321.876           |
| Beban Persediaan                                      | D.3     | 146.511.161             | 56.447.050              |
| Beban Barang dan Jasa                                 | D.4     | 9.288.497.856           | 12.673.174.812          |
| Beban Pemeliharaan                                    | D.5     | 228.147.415             | 368.839.920             |
| Beban Perjalanan Dinas                                | D.6     | 4.655.651.818           | 551.623.968             |
| Beban Barang untuk Diserahkan kepada                  | D.7     | -                       | -                       |
| Beban Penyesuaian Nilai Persediaan                    | D.8     | -                       | -                       |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                       | D.9     | 449.384.415             | 487.326.962             |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                 | D.10    | (372.119)               | 243.850                 |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                   |         | <b>20.595.440.283</b>   | <b>19.017.978.438</b>   |
| <b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>    |         | <b>(20.595.440.283)</b> | <b>(19.017.978.438)</b> |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                       |         |                         |                         |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar             | D.11    | 83.533.444              | -                       |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar                  |         | 87.460.050              | -                       |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                       |         | 3.926.606               | -                       |
| Surplus Kegiatan non Operasional Lainnya              |         | 102.561.000             | 340.637.565             |
| <b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> | D.11    | <b>186.094.444</b>      | <b>340.637.565</b>      |
| <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>         |         | <b>(20.409.345.839)</b> | <b>(18.677.340.873)</b> |
| <b>POS LUAR BIASA</b>                                 |         |                         |                         |
| Pendapatan Luar Biasa                                 | D.12    | -                       | -                       |
| Beban Luar Biasa                                      |         | -                       | -                       |
| <b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>                          |         |                         |                         |
| <b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>                             |         | <b>(20.409.345.839)</b> | <b>(18.677.340.873)</b> |

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2022 DAN 2021

*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN                                    | CATATAN | 2022             | 2021             |
|-------------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| EKUITAS AWAL                              | E.1     | 4.175.564.947    | 36.519.949.898   |
| SURPLUS/DEFISIT LO                        | E.2     | (20.409.345.839) | (18.677.340.873) |
| AKT                                       | E.3     | -                | -                |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS |         | (243.851)        | (20.480.313.279) |
| PENYESUAIAN NILAI ASET                    | E.4.1   | -                | -                |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                  | E.4.2   | -                | -                |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI                | E.4.3   | -                | (26.362.427)     |
| SELISIH REVALUASI ASET                    | E.4.4   | -                | -                |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI          | E.4.5   | -                | (93.306.000)     |
| LAIN-LAIN                                 |         | (243.851)        | (20.360.644.852) |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                   | E.5     | 20.262.598.572   | 6.813.269.201    |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS                |         | (146.991.118)    | (32.344.384.951) |
| EKUITAS AKHIR                             | E.6     | 4.028.573.829    | 4.175.564.947    |
|                                           |         |                  |                  |
|                                           |         |                  |                  |

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Komisi Pemilihan Umum sebagai sebagai suatu lembaga non-kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Komisi Pemilihan Umum berkomitmen dengan visi *“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas

dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahunan TA 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis  
Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### *Dasar Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## *Kebijakan Akuntansi*

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

#### *Pendapatan- LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan- LO*

##### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(1) Aset**

### *Aset*

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### *Aset Lancar*

#### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian                                                                               | Penyisihan |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lancar           | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo                                   | 0.5%       |
| Kurang Lancar    | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan   | 10%        |
| Diragukan        | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan     | 50%        |
| Macet            | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100%       |
|                  | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN                |            |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **(2) Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah
  - Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya

adalah nol. Dalam hal ini aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**(3) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

| <b>Kelompok Aset Tetap</b>  | <b>Masa Manfaat</b> |
|-----------------------------|---------------------|
| Peralatan dan Mesin         | 2 s.d. 20 tahun     |
| Gedung dan Bangunan         | 10 s.d. 50 tahun    |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun      |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |
|----------------------------------------|---------|

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

| <b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>                                                                       | <b>Masa Manfaat (tahun)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Software</i> Komputer                                                                                | 4                           |
| <i>Franchise</i>                                                                                        | 5                           |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10                          |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.                      | 20                          |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan                                     | 25                          |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.           | 50                          |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I                                                                            | 70                          |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(5) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(6) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

*Penjelasan  
atas Pos  
Laporan  
Realisasi  
Anggaran*

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Rincian Perubahan DIPA  
Tahun Anggaran 2022

| Uraian                   | TAHUN ANGGARAN 2022  |                         |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|
|                          | Anggaran Awal        | Anggaran Setelah Revisi |
| Pendapatan               | Rp -                 | Rp -                    |
| Penerimaan Negara        | Rp -                 | Rp -                    |
| <b>Jumlah Pendapatan</b> | <b>Rp -</b>          | <b>Rp -</b>             |
| Belanja                  | -                    | -                       |
| Belanja Pegawai          | 4.974.518.000        | 5.707.987.000           |
| Belanja Barang           | 1.598.952.000        | 14.511.838.000          |
| Belanja Modal            | -                    | 469.488.000             |
| <b>Jumlah Belanja</b>    | <b>6.573.470.000</b> | <b>20.689.313.000</b>   |

*Realisasi*

*Pendapatan*

*Rp215.674.800*

**B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp215.674.800 atau mencapai nol persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

| Uraian                                   | TAHUN ANGGARAN 2022 |                    |              |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|                                          | Anggaran            | Realisasi          | % Real Angg. |
| Pendapatan Jasa                          | -                   | -                  | -            |
| Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak | -                   | 215.674.800        | -            |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>-</b>            | <b>215.674.800</b> | <b>-</b>     |

Realisasi Pendapatan Lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp.76.192.765 (26.11%) dikarenakan berkurangnya pendapatan pengembalian atas belanja

pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari tahun anggaran yang lalu (TAYL).

*Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN                                                         | REALISASI TA 2022  | REALISASI TA 2021  | NAIK (TURUN) % |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin                  | 87.460.050         | -                  | 0,00           |
| Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai | 25.653.750         | -                  | 0,00           |
| Penerimaan Kembali Belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu     | 102.561.000        | 291.867.565        | 35,14          |
| <b>Jumlah</b>                                                  | <b>215.674.800</b> | <b>291.867.565</b> | <b>-26,11</b>  |

*Realisasi*

**B.2 Belanja**

*Belanja Negara*

*Rp20.478.273.3*

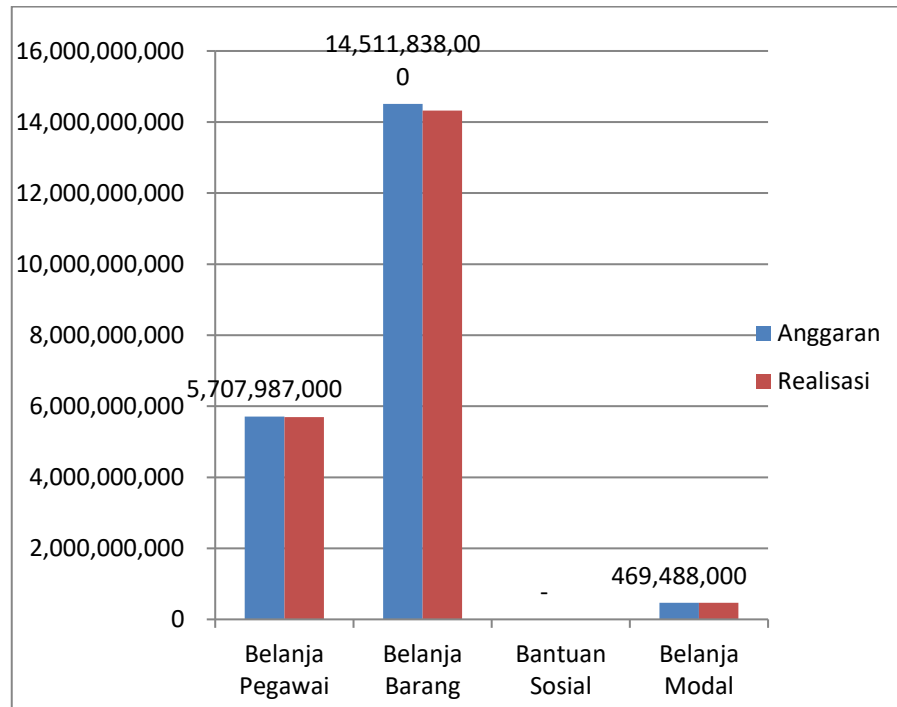
*72*

Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp20.478.273.372 atau 98.98% dari anggaran belanja sebesar Rp20.689.313.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022*

| Uraian                     | TAHUN ANGGARAN 2022   |                       |              |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                            | Anggaran              | Realisasi             | % Real Angg. |
| Belanja Pegawai            | 5.707.987.000         | 5.690.252.880         | 99,69        |
| Belanja Barang             | 14.511.838.000        | 14.319.739.092        | 98,68        |
| Belanja Modal              | 469.488.000           | 468.281.400           | -            |
| Belanja Bantuan Sosial     | -                     | -                     | -            |
| <b>Total Belanja Kotor</b> | <b>20.689.313.000</b> | <b>20.478.273.372</b> | <b>98,98</b> |
| Pengembalian               | -                     | -                     | -            |
| <b>Jumlah</b>              | <b>20.689.313.000</b> | <b>20.478.273.372</b> | <b>98,98</b> |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 11.51% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena ada penambahan belanja pegawai dengan adanya pegawai baru yang pindah dan pembayaran rapel tunjangan fungsional pegawai, untuk belanja barang juga mengalami peningkatan karena untuk pembayaran honor PPNNP se Sumatera Barat di bayarkan dari DIPA KPU Provinsi dan untuk mobil dinas juga dibayarkan melalui pengadaan sewa kendaraan, untuk Tahun 2021 tidak ada belanja modal sedangkan di Tahun 2022 ada penambahan belanja modal untuk mendukung sarana dan prasarana pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan TA 2022 dan TA 2021*

| URAIAN                 | REALISASI TA 2022     | REALISASI TA 2021     | NAIK (TURUN) % |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Belanja Pegawai        | 5.690.252.880         | 4.858.856.133         | 17,11          |
| Belanja Barang         | 14.319.739.092        | 13.506.174.628        | 6,02           |
| Belanja Modal          | 468.281.400           | -                     | -              |
| Belanja Bantuan Sosial | -                     | -                     | -              |
| <b>Jumlah</b>          | <b>20.478.273.372</b> | <b>18.365.030.761</b> | <b>11,51</b>   |

*Belanja*

*Pegawai*

*5.690.252.880*

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Tahunan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.690.252.880 dan Rp4.858.856.133. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 17.11 persen dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain karena peningkatan belanja lembur, penambahan jumlah pegawai, kenaikan pangkat pegawai di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat dan pembayaran tunjangan fungsional untuk para pejabat fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN dan Analis Hukum di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat

*Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan TA 2022  
dan TA 2021*

| URAIAN                                         | REALISASI TA<br>2022 | REALISASI TA<br>2021 | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS                 | 2.475.489.142        | 2.150.538.287        | 15,11                |
| Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara      | 1.292.773.000        | 0                    | #DIV/0!              |
| Belanja Lembur                                 | 56.138.000           | 39.188.000           | 43,25                |
| Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito | 1.868.858.273        | 2.670.795.886        | (30,03)              |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>                    | <b>5.693.258.415</b> | <b>4.860.522.173</b> | <b>17,13</b>         |
| <b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>            | <b>3.005.535</b>     | <b>1.666.040</b>     | <b>80,40</b>         |
| <b>Jumlah Belanja</b>                          | <b>5.690.252.880</b> | <b>4.858.856.133</b> | <b>17,11</b>         |

*Belanja*

*Barang*

*Rp14.319.739.0*

*92*

#### ***B.4 Belanja Barang***

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.319.739.092 dan Rp13.506.174.628. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 6.02% dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Peningkatan Belanja Barang Operasional karena Honor PPNN seluruh satker Se Sumatera Barat pada Tahun 2022 dibebankan pada DIPA KPU Provinsi Sumatera Barat dan Kendaraan Dinas Jabatan difasilitasi dalam bentuk pengadaan sewa.
2. Peningkatan Belanja Barang Persediaan, Belanja Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas karena telah mulainya fasilitasi kegiatan dengan masuknya tahapan Pemilu Serentak 2024.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan TA 2021*

| URAIAN                         | REALISASI TA 2022     | REALISASI TA 2021     | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Belanja Barang Operasional     | 4.667.186.789         | 722.072.753           | 84,53%               |
| Belanja Barang Non Operasional | 1.295.062.610         | 11.702.340.045        | -803,61%             |
| Belanja Barang Persediaan      | 146.511.161           | 56.870.200            | 61,18%               |
| Belanja Jasa                   | 3.263.044.679         | 175.030.892           | 94,64%               |
| Belanja Pemeliharaan           | 228.147.415           | 368.416.770           | -61,48%              |
| Belanja Perjalanan Dinas       | 4.740.641.818         | 551.623.968           | 88,36%               |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>    | <b>14.340.594.472</b> | <b>13.576.354.628</b> | <b>5,33%</b>         |
| Pengembalian Belanja Barang    | 20.855.380            | 70.180.000            | -236,51%             |
| <b>Jumlah Belanja</b>          | <b>14.319.739.092</b> | <b>13.506.174.628</b> | <b>5,68%</b>         |

*Belanja Modal*

*Rp468.281.400*

***B.5 Belanja Modal***

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp468.281.400 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan Tahun Anggaran 2021, karena di tahun 2022 KPU melakukan pemenuhan sarana dan prasarana untuk menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022  
dan TA 2021*

| URAIAN                                    | REALISASI TA 2022  | REALISASI TA 2021 | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Belanja Modal Tanah                       | 0                  | 0                 |                      |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 468.281.400        | 0                 | 100%                 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 0                  | 0                 |                      |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0                  | 0                 |                      |
| Belanja Modal Lainnya                     | 0                  | 0                 |                      |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>               | <b>468.281.400</b> | <b>0</b>          | <b>100%</b>          |
| Pengembalian Belanja Modal                | -                  | -                 | -                    |
| <b>Jumlah Belanja Modal</b>               | <b>468.281.400</b> | <b>0</b>          | <b>100%</b>          |

### *Belanja Modal*     **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

*Tanah Rp0*

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 masih sama nol persen dibandingkan TA 2021.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021*

| URAIAN JENIS BELANJA                          | REALISASI TA 2022 | REALISASI TA 2021 | Naik (Turun) % |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Belanja Modal Tanah                           | 0                 | 0                 | 0,00           |
| Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah      | 0                 | 0                 | 0,00           |
| Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah      | 0                 | 0                 | 0,00           |
| Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah | 0                 | 0                 | 0,00           |
| Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah      | 0                 | 0                 | 0,00           |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>    |
| Pengembalian Belanja Modal                    | -                 | -                 | -              |
| <b>Jumlah Belanja</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>    |

### *Belanja Modal*     **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

*Peralatan dan*

*Mesin*

*Rp468.281.400*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp468.281.400, mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin sebagai fasilitasi pendukung pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021*

| URAIAN                            | REALISASI TA 2022  | REALISASI TA 2021 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Alat Kantor dan Rumah Tangga      | 70.140.000         | 0                 | 0,00           |
| Alat Studio, Komunikasi, Pemancar | 15.800.000         | 0                 |                |
| Komputer Unit                     | 382.341.400        | 0                 | 0,00           |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>       | <b>468.281.400</b> | <b>0</b>          | <b>0,00</b>    |
| Pengembalian                      | -                  | -                 | -              |
| <b>Jumlah Belanja</b>             | <b>468.281.400</b> | <b>0</b>          | <b>0,00</b>    |

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
TA 2022 dan TA 2021*

| URAIAN JENIS BELANJA        | REALISASI TA 2022 | REALISASI TA 2021 | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Gedung Tempat Kerja         | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| Pengembalian Belanja Modal  | -                 | -                 | -                    |
| <b>Jumlah Belanja</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |

*Belanja Modal  
Jalan, Irigasi  
dan Jaringan  
Rp0*

**B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
TA 2022 dan TA 2021*

| URAIAN JENIS BELANJA                                                | REALISASI TA 2022 | REALISASI TA 2021 | Naik<br>(Turun)<br>% |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Belanja Modal Jaringan                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| Pengembalian Belanja Modal                                          | -                 | -                 | -                    |
| <b>Jumlah Belanja</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |

*Belanja Modal  
Lainnya Rp0*

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja  
Bantuan  
Sosial Rp0*

**B.5.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
TA 2022 dan TA 2021*

| URAIAN                           | REALISASI TA 2022 | REALISASI TA 2021 | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Kelompok Pendidikan Jaya Maju    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| Kelompok Pendidikan Cenderawasih | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| Pengembalian                     | -                 | -                 | -                    |
| <b>Jumlah Belanja</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

#### *Aset Lancar Rp0*

##### C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar KPU Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp24.263.075.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

#### *Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0*

##### C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

*31 Desember 2022 dan 2021*

| Keterangan    | TA 2022  | TA 2021  |
|---------------|----------|----------|
| Uang Tunai    | -        | -        |
| Bank          | -        | -        |
| <b>Jumlah</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

### **C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan*

*31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022*

| Keterangan    | TA 2022  | TA 2021  |
|---------------|----------|----------|
| Uang Tunai    | -        | -        |
| Bank          | -        | -        |
| <b>Jumlah</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

*Kas Lainnya  
dan Setara  
Kas Rp0*

### **C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas

pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

*31 Desember 2022 dan 2021*

| Keterangan                                       | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran             | -          | -          |
| Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan              | -          | -          |
| Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan | -          | -          |
| <b>Jumlah</b>                                    | -          | -          |

*Piutang PNB*

*Rp0*

**C.1.4 Piutang PNB**

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNB*

*31 Desember 2022 dan 2021*

| Uraian          | TA 2022 | TA 2021 |
|-----------------|---------|---------|
| Piutang PNB     | -       | -       |
| Piutang Lainnya | -       | -       |
| <b>Jumlah</b>   | -       | -       |

*Bagian Lancar*

*Tagihan*

*TP/TGR*

*Rp0*

**C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp24.385.000. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR*

*31 Desember 2022 dan 2021*

| No            | Nama           | TA 2022 | TA 2021           |
|---------------|----------------|---------|-------------------|
| 1             | Nova Indra     |         | 8.368.750         |
| 2             | Agustian       |         | 3.373.750         |
| 3             | Jumiati        |         | 6.697.500         |
| 4             | Yusrival Yakub |         | 5.945.000         |
| <b>Jumlah</b> |                |         | <b>24.385.000</b> |
|               |                |         |                   |

*Bagian Lancar* **C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

*TPA*

*Rp0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA*  
*31 Desember 2022 dan 2021*

| No            | Nama | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|---------------|------|------------|------------|
| 1             | xxx  | -          | -          |
| 2             | xxx  | -          | -          |
| <b>Jumlah</b> |      | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

*Penyisihan*

*Piutang Tak*

*Tertagih –*

*Piutang Lancar*

*Rp 0*

**C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp121.925. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja  
Dibayar di  
Muka Rp0*

### **C.1.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka  
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

| Jenis                               | TA 2022  | TA 2021  |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Pembayaran Internet                 | -        | -        |
| Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin | -        | -        |
| Pembayaran Sewa Gedung Kantor       | -        | -        |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>-</b> | <b>-</b> |

*Pendapatan  
yang Masih  
Harus  
Diterima Rp0*

### **C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus  
Diterima 31 Desember 2022 dan 2021*

| Jenis                                | TA 2022  | TA 2021  |
|--------------------------------------|----------|----------|
| Pendapatan Jasa Pelatihan            | -        | -        |
| Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan | -        | -        |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>-</b> | <b>-</b> |

*Persediaan Rp  
0,-*

### **C.1.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember

2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan TA 2022 dan TA 2021*

| Persediaan        | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|-------------------|------------|------------|
| Barang konsumsi   | -          | -          |
| <i>Bahan Baku</i> | -          | -          |
| <i>Jumlah</i>     | -          | -          |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tanah*

*Rp*

*2.426.907.000,.*

**C.2.1 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 2.426.907.000,- dan Rp 2.426.907.000,-. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | 2.426.907.000 |
| Mutasi tambah:                             | 0             |
| -                                          | 0             |
| Mutasi kurang                              |               |
| -                                          | 0             |
| -                                          | 0             |
| Saldo per 31 Desember 2022                 | 2.426.907.000 |

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

## Rincian Tanah TA 2022

| No | Luas (m2) | Lokasi                                      | Nilai         |
|----|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2127      | Kel. Aia Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang | 2,426,907,000 |

Peralatan dan  
Mesin

Rp.

3.449.844.540

,-

## C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp 3.449.844.540,- dan Rp. 3.576.466.120,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021     | 3.576.466.120 |
| Mutasi tambah:                                 |               |
| Pembelian                                      | 468.281.400   |
| Hibah Barang                                   | 0             |
| Perolehan lainnya                              |               |
| Koreksi tambah                                 | 0             |
| Mutasi kurang:                                 | 0             |
| Reklassifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya | 594.902.980   |
| Saldo per 30 Juni 2022                         | 3.449.844.540 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022     | 2.509.035.044 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2022                | 940.809.496   |

Alat kantor dan rumah tangga tersebut meliputi :

| Uraian Jenis Transaksi    | Unit | Rupiah (Rp)  |
|---------------------------|------|--------------|
| Pembelian                 |      |              |
| 1. Lemari Kayu            | 1    | 8.000.000,-  |
| 2. Alat Penghancur Kertas | 1    | 3.000.000,-  |
| 3. LCD Projector/Infocus  | 2    | 17.800.000,- |
| 4. Papan Pengumuman       | 1    | 2.490.000,-  |
| 5. Meja Kerja Besi        | 1    | 2.700.000,-  |
| 6. AC Split               | 1    | 9.400.000,-  |
| 7. Lambang Instansi       | 1    | 13.900.000,- |
| 8. Loudspeaker            | 1    | 9.000.000,-  |
| 9. Lampu                  | 1    | 3.850.000,-  |

## 2. ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR

| Uraian Jenis Transaksi      | Unit | Rupiah (Rp)  |
|-----------------------------|------|--------------|
| Pembelian                   |      |              |
| 1. Digital LED Running Text | 1    | 11.900.000,- |
| 2. Camera Conference        | 1    | 3.900.000,-  |

| Uraian Jenis Transaksi | Unit | Rupiah (Rp)   |
|------------------------|------|---------------|
| Pembelian              |      |               |
| 1. Laptop              | 14   | 251.000.000,- |
| 2. Tablet PC           | 6    | 58.541.400,-  |
| 3. Printer             | 8    | 24.200.000,-  |
| 4. Scanner             | 3    | 48.600.000,-  |

Terdapat mutasi kurang peralatan dan mesin berupa:

#### 1. Komputer

| Uraian Jenis Transaksi | Unit | Rupiah (Rp)   |
|------------------------|------|---------------|
| Pembelian              |      |               |
| 1. P.C Unit            | 23   | 293.726.560,- |
| 2. Lap Top             | 18   | 204.244.790,- |
| 3. Note Book           | 2    | 19.980.000,-  |
| 4. Printer             | 21   | 76.951.630,-  |

Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan aset yang dari kondisi Baik menjadi Rusak Ringan senilai Rp 594.902.980,-. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp.  
892.347.000,-*

#### C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 892.347.000,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | 892.347.000  |
| Mutasi tambah:                             |              |
| Perolehan Lainnya                          |              |
| Pengembangan                               |              |
| Revaluasi BMN                              |              |
| Mutasi tambah :                            | -            |
| Reval                                      |              |
| Saldo per 31 Desember 2022                 | 892.347.000  |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022 | (94.875.677) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2022            | 797.471.323  |

Jalan, Jaringan  
dan Irigasi Rp  
0,-

#### C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | - |
| Mutasi tambah:                             |   |
| Penambahan jaringan teknologi informasi    | - |
| Mutasi kurang:                             | - |
| Saldo per 31 Desember 2022                 | - |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022 | - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2022            | - |

Aset Tetap  
Lainnya Rp0,-

#### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian aset tetap lainnya ini untuk Semester 1 Tahun Anggaran 2022, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | 0 |
| Mutasi tambah:                             |   |
| Mutasi kurang:                             | 0 |
| Saldo per 31 Desember 2022                 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022 | 0 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2022            | 0 |

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan Rp  
0,-

#### C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,- sebagaimana disajikan pada

tabel berikut:

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Mutasi tambah:                            |   |
| -                                         | 0 |
| Mutasi kurang:                            |   |
| -                                         | 0 |
| Saldo per 31 Desember 2022                | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022 | 0 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2022           | 0 |

Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp2.603.910.7  
21

### C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp 2.603.910.721,- dan Rp 2.749.745.486,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

TA 2022

| No                | Aset Tetap    | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku    |
|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 1                 | Peralatan d   | 3.449.844.540   | 2.509.035.044        | 940.809.496   |
| 2                 | Gedung dar    | 892.347.000     | 94.875.677           | 797.471.323   |
| 3                 | Jalan, Irigas | 0               | 0                    | 0             |
| 4                 | Aset Tetap    | 0               | 0                    | 0             |
| 5                 | Aset Tetap    | 0               | 0                    | 0             |
| Akumulasi Penyusu |               | 4.342.191.540   | 2.603.910.721        | 1.738.280.819 |

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Piutang  
Jangka  
Panjang  
Rp23.000.668*

### **C. 3 Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang KPU Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp23.000.668 dan Rp24.263.075.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

*Piutang  
Tagihan  
TP/TGR  
Rp23.116.250*

#### **C.3.1 Piutang Tagihan TP/TGR**

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) KPU Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp23.116.250 dan Rp24.385.000.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2022 dan 2021  
(dalam rupiah)*

| No. | Uraian                | Tahun 2022        | Tahun 2021        |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | <u>Fristy Lahira</u>  | 700.000           | 8.368.750         |
| 2.  | <u>Yusrival Yakub</u> | 9.390.000         | 5.945.000         |
| 3.  | <u>Agustian</u>       | 4.347.500         | 3.373.750         |
| 4.  | <u>Jumiati</u>        | 8.678.750         | 6.697.500         |
|     | <b>Jumlah</b>         | <b>23.116.250</b> | <b>24.385.000</b> |

Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih-  
TP/TGR  
Rp(115.582)

### C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp(121.925).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbaikan, Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Asuransi yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebesar Rp(115.582).

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang  
TA 2022*

*(dalam rupiah)*

| Kualitas Piutang      | Nilai Piutang     | Penyisihan | Nilai<br>Penyisihan |
|-----------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>Tagihan TP/TGR</b> |                   |            |                     |
| <b>Lancar</b>         | 23.116.250        | 0,5%       | 115.582             |
| <b>Kurang Lancar</b>  |                   |            |                     |
| <b>Diragukan</b>      |                   |            |                     |
| <b>Macet</b>          |                   |            |                     |
| <b>Jumlah</b>         | <b>23.116.250</b> |            | <b>115.582</b>      |

Aset Tak  
Berwujud Rp.  
0,-

### C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | - |
| ➤ Mutasi tambah:                           |   |
| ➤ Pembelian                                | - |
| ➤ Mutasi kurang:                           | - |
| Saldo per 31 Desember 2022                 | - |
| Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022 | - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2022            | - |

Aset Lain-Lain  
Rp.

### C.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

879.902.980,- Desember 2021 adalah Rp. 879.902.980,- dan Rp. 593.759.420,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b> | <b>879.902.980</b> |
| <b>Mutasi tambah:</b>                             |                    |
| <b>Mutasi kurang:</b>                             | 0                  |
| <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>                 | <b>879.902.980</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022         | 0                  |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>            | <b>879.902.980</b> |

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi  
Penyusutan  
dan  
Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp  
589.832.814,-

#### C.4.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp 589.832.814,- dan Rp 589.516.614,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan akumulasi Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengukuran penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

| <b>Aset Tetap</b> | <b>Nilai Perolehan</b> | <b>Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi</b> | <b>Nilai Buku</b> |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Aset Lain-lain    | 879.902.980            | 879.902.980                             | 0                 |
| <b>Jumlah</b>     | <b>879.902.980</b>     | <b>879.902.980</b>                      | <b>0</b>          |

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

**Uang Muka****dari KPPN Rp0****C.5.1 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

**Utang kepada****Pihak Ketiga****Rp159.614.65****8****C.5.2 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp159.614.658 dan Rp23.178.643. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga 1 dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2022**(dalam rupiah)*

| No.          | Uraian                                                              | Jumlah             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.           | Utang Pegawai yang Masih Harus di Bayar (Tukin bulan Desember 2022) | 158.832.600        |
| 2.           | Utang kepada Pihak ke Tiga Lainnya (Langganan Air dan Telephone)    | 782.058            |
| <b>Total</b> |                                                                     | <b>159.614.658</b> |

**Pendapatan****Diterima Di****Muka Rp0****C.5.3 Pendapatan Diterima Di Muka**

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

*Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Per 31  
Desember 2022 dan 2021*

| Uraian                     | TA 2022 | TA 2021 |
|----------------------------|---------|---------|
| Pendapatan Diterima Dimuka | -       | -       |
|                            | -       | -       |
| <b>Jumlah</b>              | -       | 0       |

*Utang Jangka  
Pendek  
Lainnya  
Rp0*

#### **C.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

*Perbandingan Rincian Utang jangka Pendek Lainnya  
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

| No            | Uraian | TA 2022 | TA 2021 |
|---------------|--------|---------|---------|
| 1             |        | -       | -       |
| 2             |        |         |         |
| <b>Jumlah</b> |        | -       | -       |

*Ekuitas*

*Rp4.028.573.829*

#### **C.7 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.028.573.829 dan Rp4.175.564.947. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### **D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

*Pendapatan  
PNBP*

*Rp0*

#### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0

dan Rp0.

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2022  
dan 31 Desember 2021*

| URAIAN               | TA 2022  | TA 2021  | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|----------------------|----------|----------|----------------------|
| Pendapatan Jasa      | 0        | 0        | 0                    |
| Pendapatan Lain-lain | 0        | 0        | 0                    |
| <b>Jumlah</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             |

Beban

Pegawai

Rp5.827.619.737

37

## D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.827.619.737 dan Rp4.880.321.876. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai  
31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN                      | TA 2022              | TA 2021              | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beban Gaji                  | 2.472.483.607        | 2.148.872.247        | 15                   |
| Beban Tunjangan-tunjangan   | 3.298.998.130        | 2.692.261.629        | 23                   |
| Beban Honorarium dan Vakasi | 0                    | 0                    | #DIV/0!              |
| Beban Lembur                | 56.138.000           | 39.188.000           | 43                   |
| <b>Jumlah Beban</b>         | <b>5.827.619.737</b> | <b>4.880.321.876</b> | <b>19</b>            |

Beban

Persediaan

Rp146.511.161

## D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar 146.511.161 dan Rp56.447.050. Beban Persediaan merupakan beban

untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan  
31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN                    | TA 2022            | TA 2021           | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 146.511.161        | 56.447.050        | 160                  |
| Persediaan bahan baku     | -                  | -                 | 0                    |
| Beban Persediaan Lainnya  | -                  | -                 | 0                    |
| <b>Jumlah</b>             | <b>146.511.161</b> | <b>56.447.050</b> | <b>160</b>           |

Beban Barang  
dan Jasa  
Rp9.288.497.8  
56

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.288.497.856 dan Rp12.673.174.812. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Rincian Beban Barang dan Jasa  
31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BEBAN                                     | TA 2022              | TA 2021               | NAIK<br>(TURUN) % |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Beban Keperluan Perkantoran                            | 4.494.040.148        | 515.666.100           | 771,50            |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos                       | 1.324.500            | 678.500               | 95,21             |
| Beban Honor Operasional Satker                         | 118.858.000          | 132.646.000           | (10,39)           |
| Beban Barang Operasional Lainnya                       | 41.808.750           | 34.040.000            | 22,82             |
| Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19 | 11.155.391           | 39.042.153            | (71,43)           |
| Beban Bahan                                            | 1.062.199.230        | 123.656.050           | 758,99            |
| Beban Honor Output Kegiatan                            | 130.480.000          | 1.515.080.000         | (91,39)           |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya                   | 163.818.000          | 10.135.622.217        | (98,38)           |
| Beban Langganan Listrik                                | 85.563.545           | 71.823.300            | 19,13             |
| Beban Langganan Telepon                                | 565.378              | 723.307               | (21,83)           |
| Beban Langganan Air                                    | 9.097.600            | 10.658.900            | (14,65)           |
| Beban Sewa                                             | 2.384.750.000        | 0                     | #DIV/0!           |
| Beban Jasa Profesi                                     | 123.410.000          | 6.800.000             | 1714,85           |
| Beban Jasa Lainnya                                     | 657.912.314          | 83.745.285            | 685,61            |
| Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19                 | 815.000              | 2.993.000             | (72,77)           |
| Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin          | 2.700.000            | 0                     | #DIV/0!           |
| <b>Jumlah Beban</b>                                    | <b>9.288.497.856</b> | <b>12.673.174.812</b> | <b>(26,71)</b>    |

Beban  
Pemeliharaan  
Rp228.147.415

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp228.147.415 dan Rp368.839.920. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BEBAN                        | TA 2022            | TA 2021            | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan    | 61.085.188         | 243.735.500        | - 75                 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin    | 167.062.227        | 124.681.270        | 33,99                |
| Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan | 0                  | 423.150            | - 100                |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>228.147.415</b> | <b>368.839.920</b> | - 38                 |

Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp4.655.651.818

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.655.651.818 dan Rp551.623.968. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas  
31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BEBAN                              | TA 2022              | TA 2021            | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Beban Perjalanan Biasa                          | 1.778.052.122        | 430.787.159        | 312,74               |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota               | 136.800.000          | 23.050.000         | 493,49               |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 1.883.765.000        | 42.440.000         | 4338,65              |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  | 857.034.696          | 55.346.809         | 1448,48              |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>4.655.651.818</b> | <b>551.623.968</b> | <b>743,99</b>        |

Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp0

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada  
Masyarakat 31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BEBAN                                                 | TA 2022  | TA 2021  | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0        | 0        | 0,00                 |
| Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda      | 0        | 0        | #DIV/0!              |
| <b>Jumlah</b>                                                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>#DIV/0!</b>       |

#### **D.8 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan**

Beban  
Penyesuaian  
Nilai  
Persediaan  
Rp0

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyesuaian Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial  
31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BEBAN                 | TA 2022  | TA 2021  | % NAIK<br>(TURUN) |
|------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | 0        | 0        | 0,00              |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>       |

Beban  
Penyusutan  
dan  
Amortisasi  
Rp449.384.415

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp449.384.415 dan Rp487.326.962. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi*

*31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI           | TA 2022            | TA 2021            | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin             | 429.157.927        | 466.278.246        | (8)                  |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan             | 19.910.288         | 19.910.288         | -                    |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan        | -                  | -                  | -                    |
| Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan | 316.200            | 1.138.428          | (72)                 |
| <b>Jumlah Penyusutan</b>                         | <b>449.384.415</b> | <b>487.326.962</b> | <b>(8)</b>           |
|                                                  |                    |                    | -                    |
| Beban Amortisasi Software                        | -                  | -                  | -                    |
| Beban Penyusutan aset lain-lain                  | -                  | -                  | -                    |
| <b>Jumlah Amortisasi</b>                         | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>             |
| <b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>    | <b>449.384.415</b> | <b>487.326.962</b> | <b>(8)</b>           |

Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih  
Rp(372.119)

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

adalah masing-masing sebesar Rp(372.119) dan Rp243.850. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BEBAN                                         | TA 2022         | TA 2021        | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar     | -121.925        | 121.925        | 0,00                 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar | -250.194        | 121.925        | 0,00                 |
| <b>Jumlah</b>                                              | <b>-372.119</b> | <b>243.850</b> | <b>0,00</b>          |

Kegiatan Non  
Operasional  
Rp186.094.44  
4

#### **D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional  
31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN                                                 | TA 2022            | TA 2021            | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar                   | 87.460.050         | 0                  | #DIV/0!              |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                        | 3.926.606          | 0                  | #DIV/0!              |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya       | 102.561.000        | 340.637.565        | (69,89)              |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b> | <b>186.094.444</b> | <b>340.637.565</b> | <b>(45,37)</b> *)    |

*Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar  
Biasa Rp0

#### **D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah

sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa  
31 Desember 2022 dan 2021*

| URAIAN                 | TA 2022  | TA 2021  | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|------------------------|----------|----------|----------------------|
| Pendapatan PNB         | 0        | 0        | 0,00                 |
| Beban Perjalanan Dinas | 0        | 0        | 0,00                 |
| Beban Persediaan       | 0        | 0        | 0,00                 |
| <b>Jumlah</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>          |

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp4.175.564.947

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.175.564.947 dan Rp36.519.949.898.

Defisit LO

Rp20.409.345.839

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.409.345.839 dan Rp18.677.340.873. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

### E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp0

### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

| Jenis Persediaan | Koreksi  |
|------------------|----------|
| Barang Konsumsi  | -        |
| Suku Cadang      | -        |
| <b>Jumlah</b>    | <b>-</b> |

Selisih  
Revaluasi Aset  
Tetap Rp0

### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp Rp0.

Koreksi atas  
Reklasifikasi  
Rp0

### **E.3.4 Koreksi atas Reklasifikasi**

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp26.362.427.

Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi Rp0

### **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp93.306.000. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2022*

| Jenis Aset Tetap    | Nilai Koreksi |
|---------------------|---------------|
| Peralatan dan Mesin | -             |
| Gedung dan Bangunan | -             |
| <b>Jumlah</b>       | <b>-</b>      |

Koreksi Lain-Lain  
Lain Rp0

### **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain*

| Jenis Beban        | Jumlah Koreksi |
|--------------------|----------------|
| Koreksi Beban      | -              |
| Koreksi Pendapatan | -              |
| Koreksi Piutang    | -              |
| Koreksi Kewajiban  | -              |
| Koreksi Hibah      | -              |
| <b>Jumlah</b>      | <b>-</b>       |

Transaksi  
Antar Entitas  
Rp20.262.598.572

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp20.262.598.572 dan Rp Rp6.813.269.201. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

| Transaksi Antar Entitas                | Nilai                 |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Diterima dari Entitas Lain             | (215.674.800)         |
| Ditagihkan ke Entitas Lain             | 20.478.273.372        |
| Transfer Masuk                         | -                     |
| Transfer Keluar                        | -                     |
| Pengesahan Hibah Langsung              | -                     |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | -                     |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>20.262.598.572</b> |

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp(215.674.800) sedangkan DKEL sebesar Rp20.478.273.372.

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0 terdiri dari:

| No | Jenis               | Entitas Asal | Nilai |
|----|---------------------|--------------|-------|
| 1  | Peralatan dan Mesin | Rp -         | -     |
| 2  | Persediaan          | Rp -         | -     |
|    | <b>Jumlah</b>       |              | -     |

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,-

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan

transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

| No                            | Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Nilai Hibah |
|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1                             | -             | Barang       | Rp -        |
|                               |               |              |             |
| <b>Total Pengesahan</b>       |               |              | <b>Rp -</b> |
| Pengesahan Pengembalian Hibah |               |              | Rp -        |
| <b>Jumlah</b>                 |               |              | <b>Rp -</b> |

## Ekuitas Akhir **E.5 Ekuitas Akhir**

Rp4.028.573.829

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.028.573.829 dan Rp4.175.564.947.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

#### **a. Pejabat Pengelola Keuangan**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/HK.03.2/13/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangguna Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Barat

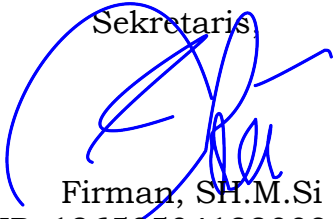
sebagai berikut:

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Kuasa Pengguna Anggaran  | : Firman, SH.M.Si           |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Fairuz Hayatus S, SE,M.Si |
| Pejabat PPSPM            | : Yurika Amalia, SE         |
| Bendahara                | : Riski, A.Md               |

Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat perubahan personil Pengelola Keuangan Sebanyak 2 (dua) kali perubahan. Perubahan ini disebabkan karena adanya pergantian jabatan struktural dan fungsional di sub bagian keuangan. Untuk Pejabat Pengelola Keuangan yang tercantum dalam SK perubahan terakhir Nomor 32 Tahun 2022 Tanggal 28 Maret 2022 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/HK.03.2/13/2022 Tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Sekrtariat KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Kuasa Pengguna Anggaran  | : Firman, SH.M.Si       |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Efri Nofrita, SE,M.Si |
| Pejabat PPSPM            | : Silka Hartina, SE     |
| Bendahara                | : Riski, A.Md           |

  
Firman, SH.M.Si  
NIP. 196505041990031008

